BUDAYA POLITIK MASYARAKAT MINANGKABAU[1]

Oleh : Irawati[2], Bakaruddin Rosyidi[3], Aidinil Zetra[4]

Abstract

The political culture phenomenon becomes characteristic life of politics and governance a society. The political culture will be formed of by orientation and what people care about its political system. This article represents result of research, which sees political culture of nagari society by using political culture theory of Almond and Verba.

Pendahuluan

Setiap masyarakat yang terdiri dari sejumlah individu baik yang hidup dalam sistem politik tradisional, transisional maupun modern memiliki budaya politik. Budaya politik merupakan fenomena yang menjadi ciri kehidupan politik dan pemerintahan suatu masyarakat[5].

Berbagai macam tipe budaya politik dikemukan oleh para ahli, salah satunya adalah tipe budaya politik yang dikemukakan oleh Gabriel Almond dan Sidney Verba. Menurut mereka secara umum ada tiga tipe budaya politik yaitu :

1. Budaya politik parokial, dimana kesadaran politik sebagian besar rakyat sangat rendah, pengetahuan akan politik sangat rendah, masyarakat tidak terlibat dalam proses politik meskipun mereka menyadari adanya pusat kekuasaan.
2. Budaya politik subyek, dimana masyarakat mempunyai perhatian dan kesadaran terhadap sistem politik. Namun mereka memandang posisinya sebagai subyek yang pasif.
3. Budaya politik partisipan, kesadaran politik rakyat tinggi, Dengan pengetahuan dan kesadaran akan sistem politik rakyat ikut serta dan melibatkan diri secara aktif dalam kegiatan politik.

Budaya politik ini akan tercermin dalam perilaku politik masyarakat secara umum baik terhadap pemerintahan maupun terhadap sistem politik yang lebih luas[6].

Jika dilihat dalam masyarakat Sumatera Barat yang lebih sering disebut dengan masyarakat Minangkabau, penelitian yang mengkaji budaya politik secara khusus belumlah ada. Sisi kehidupan politik masyarakat belum dibahas, terutama bagaimana

---

[1] Skripsi Sarjana Ilmu Politik Fisip Universitas Andalas. Dengan Judul "Budaya Politik Masyarakat Minangkabau Studi Di Nagari Kamang Mudik" 2003

[2] Sarjana Jurusan Ilmu Politik FISIP Universitas Andalas 2005

[3] Dosen Jurusan Ilmu Politik FISIP Universitas Andalas, saat ini menjabat sebagai Ketua Jurusan Ilmu Politik FISIP Universitas Andalas

[4] Dosen Jurusan Ilmu Politik FISIP Universitas Andalas

[5] Sudijono Sastroatmodjo, *Perilaku politik*, IKIP Semarang Press, Semarang, 1995, hal.35.

[6] Affan Gafar, *Politik Indonesia Transisi Menuju Demokrasi*, PustakaPelajar,Yogyakarta,2000,hal. 106.

peranan dan pandangan masyarakat terhadap kehidupan politik dan pemerintahan. Padahal masyarakat merupakan kelompok yang akan dikenai dan merasakan akibat dari proses atau kegiatan-kegiatan politik tersebut.

Ketika nagari kembali dijadikan sebagai bentuk pemerintahan di Sumatera Barat, masalah nagari menjadi perbincangan yang sangat penting. Pengaturan tentang nagari yang tertuang dalam Peraturan Daerah No. 9 Tahun 2000 membawa nuansa baru pada struktur, sistem dan mekanisme dalam kehidupan nagari baik penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan maupun pembinaan kemasyarakatan. Nagari merupakan pemerintahan yang memiliki otonomi dan berhak menyelenggarakan pemerintahan sendiri sesuai dengan kebutuhan dan kepentingan masyarakatnya. Dengan demikian sistem pemerintahan nagari sangat perlu mengembangkan peranserta dan memberdayakan masyarakatnya.

Jika kita lihat lebih dalam lagi pengaturan nagari dalam Peraturan Daerah No. 9 Tahun 2000 ini, nagari memiliki struktur-struktur politik modern dengan adanya legislatif (BPAN), eksekutif (Wali Nagari) dan diberikannya kebebasan pada masyarakat untuk membentuk lembaga-lembaga atau organisasi kemasyarakatan sebagai wadah menampung kepentingan mereka. Selain itu masih ada lembaga-lembaga lainnya seperti Majelis Ulama Nagari (MUN), Kerapatan Adat Nagari (KAN) dan Badan Musawarah Adat dan Syara' Nagari (BMASN). Pengaturan Nagari seperti ini bertujuan untuk mengembangkan bentuk pemerintahan yang benar-benar sesuai dengan karakteristik sosial budaya masyarakat dan melibatkan masyarakat dalam pelaksanaan pemerintahan tersebut.

Bertolak dari pengaturan nagari diatas, idealnya masyarakat Minangkabau memiliki budaya politik yang partisipan. Mengingat pengaturan nagari menuntut peran serta dan keaktifan masyarakat yang juga didukung oleh budaya Minangkabau yang demokratis[7]. Namun persoalannya ketika dilihat di nagari Kamang Mudik yang seluruh penduduknya merupakan suku Minangkabau cendrung memperlihatkan ketidakpedulian masyarakat terhadap kehidupan politik dan pemerintahan nagari. Berangkat dari teori budaya politik Almond dan verba serta didukung oleh fenomena diatas penulis tertarik untuk melakukan penelitian ini. Bagaimana pengetahuan masyarakat tentang kehidupan nagari? Bagaimana perasaan dan partisipasi masyarakat dalam politik dan pemerintahan nagari? Dengan menggunakan pembagian tipe budaya politik Almond dan Verba ini peneliti akan melihat budaya politik apakah yang berkembang dalam masyarakat nagari khususnya di nagari Kamang Mudik? Penelitian ini dilakukan guna menjawab pertanyaan tersebut dengan melakukan penelitian di masyarakat nagari Kamang Mudik Kabupaten Agam.

Kerangka teoritis

Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori budaya politik yang dikembangkan oleh Almond dan Verba dan teori sistem politik struktural fungsional yang juga dikembangkan oleh Almond.

---

[7] Ahmad Syafii Ma'arif, "Gagasan Demokrasi dalam Perspektif Budaya Minangkabau", dalam Mohammad Najib (ed) *,Demokrasi dalam Perspektif Budaya Bangsa*, LKPSM, Yogyakarta, 1996, hal.143.

1. Tinjauan tentang Budaya Politik

Budaya politik merupakan fenomena umum yang menjadi ciri kehidupan politik dan pemerintahan suatu masyarakat[8]. Menurut Gabriel Almond dan Sidney Verba bahwa keterlibatan masyarakat dalam kehidupan politik dan pemerintahan merupakan bentuk budaya politik. Mereka menjelaskan, kebudayaan politik merupakan orientasi sikap politik individu terhadap sistem politik dan komponen-komponennya dan juga sikap individu terhadap peran yang dimainkannya dalam suatu sistem politik[9]. Budaya politik tak lain merupakan orientasi individu dalam masyarakat terhadap kehidupan politik dan pemerintahan.[10] Untuk mengidentifikasi tentang orientasi individu terhadap objek politik ini mengacu pada tiga bentuk orientasi yaitu:

1. Orientasi kognitif (pengetahuan), menyangkut pengetahuan dan kepercayaan terhadap sistem politik, peranan dan segala kewajibannya, serta input dan outputnya.
2. Orientasi afektif (perasaan), menyangkut perasaan terhadap sistem politik, peranannya, para aktor dan penampilannya.
3. Orientasi evaluatif, menyangkut keputusan dan pendapat tentang obyek politik yang secara tipikal melibatkan kombinasi norma-norma partisipasi dan penampilan dalam sistem politik[11].

Ketiga komponen orientasi tersebut dapat digunakan untuk mengidentifikasi orientasi sikap politik individu terhadap sistem politiknya. Bentuk-bentuk orientasi ini dapat diidentifikasi dengan menggunakan ukuran-ukuran sebagai berikut[12]:

1. Pengetahuan dan kepercayaan tentang berbagai segi pemerintahan dan politik Untuk mengukur pengetahuan dan kepercayaan ini digunakan ukuran yang meliputi :
   - ✓ Pengetahuan tentang struktur pemerintahan
   - ✓ Pemahaman tentang input dan output pemerintah
   - ✓ Derajat kesadaran dan keterbukaan terhadap politik dan urusan-urusan umum.
   - ✓ Penguasaan informasi politik yang dimiliki oleh individu.
2. Perasaan (emosi) masyarakat terhadap pemerintahan dan politik yang diukur dengan menggunakan ukuran sebagai berikut :
   - ✓ Perasaan individu terhadap proses-proses penetapan kebijaksanaan umum pemerintahan dan pendangannya terhadap pengaruh pemerintah.
   - ✓ Jenis pengharapan terhadap perlakuan para aparat atau pejabat pemerintahan yang melaksanakan peraturan.
   - ✓ Sikap terhadap komunikasi politik terutama kebebasan untuk membicarakan masalah-masalah politik.

---

[8] Rusadi Kantaprawira, *Sistem Politik Indonesia: Suatu Pengantar*, Sinar Baru, Bandung, 1988, hal. 25.
[9] Gabriel Almond dan Sidney Verba, *Budaya Politik, Tingkah Laku Politik dan Demokrasi di Lima Negara*, Terj. Sahat Simamora, Bumi Aksara, Jakarta, 1990, hal.4.
[10] ibid, hal. 99.
[11] ibid, hal. 16.
[12] ibid, hal. 56 dan 80.

3. Partisipasi politik individu dalam pemerintahan dan politik nagari. Ukuran yang digunakan untuk mengidentifikasi masalah ini adalah:
   - ✓ Pandangan individu terhadap kewajiban untuk berpartisipasi
   - ✓ Peranan atau partisipasi individu dalam masalah-masalah pemerintahan dan kegiatan-kegiatan politik.
   - ✓ Pengaruh individu atas kebijakan pemerintahan.
   - ✓ Kualitas dan bobot pengaruh individu terhadap keputusan umum pemerintahan.

Berdasarkan orientasi sikap politik warga negara Almond dan Verba membagi tiga bentuk budaya politik sebagai berikut[13] :

1. Budaya politik parokial.
   Masyarakat memiliki pengetahuan yang rendah tentang sistem politiknya sehingga mereka memiliki kesadaran politik yang rendah terhadap obyek politik baik objek input, output maupun berbagai partisipasi. Masyarakat secara umum tidak menaruh minat begitu besar terhadap objek politik yang luas dan tidak mengharapkan apapun dari sistem politik. Hal yang paling menonjol adalah masyarakat tidak terlibat dalam proses politik namun mereka menyadari adanya pusat kekuasaan politik.
2. Budaya politik subyek
   Anggota masyarakat memiliki pengetahuan yang tinggi tentang sistem politik secara umum. Mereka juga mempunyai minat, perhatian dan kesadaran tinggi terhadap sistem politik tetapi hanya segi output (kebijakan). Sedangkan orientasi terhadap aspek input dan partisipasi rendah. Posisi mereka sebagai subyek dipandang sebagai posisi yang pasif. Mereka beranggapan sebagai subyek mereka tidak berdaya untuk mempengaruhi ataupun mengubah sistem. Secara umum mereka menerima segala keputusan dan kebijaksanaan yang diambil oleh pejabat yang berwenang dan segala keputusan yang diambil oleh pemimpin politik adalah sesuatu yang bersifat mutlak, tidak dapat diubah.
3. Budaya politik partisipan
   Masyarakat memiliki pengetahuan dan kesadaran yang tinggi tentang sistem politik. Mereka memiliki orientasi politik yang ditujukan pada sistem secara keseluruhan terhadap struktur, proses politik dan administrasi, tegasnya terhadap input maupun output dari sistem politik itu. Mereka ikut terlibat secara aktif dalam kegiatan politik. Seseorang dianggap anggota aktif dalam kehidupan politik, memiliki kesadaran terhadap hak dan tanggungjawabnya dan mereka mempergunakan hak-hak politiknya, mereka tidak menerima begitu saja keputusan politik. Masyarakat memiliki kesadaran sebagai totalitas, masukan dan keluaran dalam konstelasi sistem politik yang ada.

Teori Sistem Politik Struktural - Fungsional

Memahami budaya politik berarti kita harus pula memahami sistem politiknya, karena budaya politik merupakan orientasi sikap politik individu terhadap sistem politiknya. Menurut Gabriel Almond sistem politik merupakan organisasi melalui mana

[13] *Ibid*, hal. 20 - 24.

masyarakat merumuskan dan berusaha mencapai tujuan-tujuan bersama mereka. Pada hakekatnya sistem politik sebagai suatu mekanisme untuk merubah suatu tuntutan dari masyarakat (input) menjadi kebijaksanaan (output) yang melalui saluran umpan balik akan menjadi calon input baru. Almond menjelaskan bahwa dalam menganalisa sistem politik sangat penting membahas konsep struktur dan fungsi. Dengan kata lain untuk melakukan berbagai kegiatan sistem politik mempunyai lembaga-lembaga (struktur) seperti kelompok kepentingan, partai politik, legislatif, eksekutif, birokrasi dan lembaga peradilan yang menjalankan kegiatan atau fungsi-fungsi tertentu sehingga memungkinkan sistem politik tersebut untuk merumuskan dan melaksanakan kebijaksanaan-kebijaksanaannya [14].

Sistem politik memiliki tiga fungsi yang secara tidak langsung terlibat dalam proses pembuatan dan pelaksanaan kebijaksanaan pemerintah. *Pertama* fungsi sosialisasi politik yang mengembangkan dan memperkuat sikap-sikap politik dikalangan masyarakat atau melatih masyarakat untuk menjalankan peranan-peranan politik. *Kedua* fungsi rekrutmen politik yang melakukan penyeleksian masyarakat untuk kegiatan-kegiatan politik. *Ketiga* fungsi komunikasi politik sebagai sarana mengalirnya informasi melalui masyarakat dan melalui berbagai struktur yang ada dalam sistem politik. Ketiga fungsi ini berada ditengah-tengah sistem politik yang akan berpengaruh pada masyarakat, kelompok kepentingan, legislatif, eksekutif, birokrasi maupun badan-badan peradilan.

Didalam sistem politik tersebut terdapat fungsi-fungsi yang diperlukan untuk merumuskan dan melaksanakan kebijaksanaan. Sebelum kebijaksanaan individu-individu dan kelompok-kelompok dalam masyarakat harus menentukan apa yang menjadi kepentingan mereka. Kepentingan atau tuntutan masyarakat ini akan disampaikan melalui kelompok kepentingan ataupun melalui partai politik (artikulasi kepentingan). Kepentingan-kepentingan atau tuntutan-tuntutan yang hampir sama harus digabungkan menjadi alternatif-alternatif kebijaksanaan agar mendapat respon dari sistem politik (agregasi kepentingan). Selanjutnya alternatif kebijaksanaan itu akan dijadikan pertimbangan dalam penentuan pilihan. Penentuan kebijaksanaan ini dilakukan oleh legislatif dan bekerjasama dengan eksekutif. Kebijaksanaan yang telah ditetapkan atau disebut juga dengan output ini harus dilaksanakan dan bila terjadi penentangan dan penyelewengan maka harus ada proses penghakiman oleh lembaga peradilan.

Penerapan kebijaksanaan pemerintahan ini mempengaruhi kehidupan ekonomi, struktur sosial dan kebudayaan masyarakat. Pengaruh-pengaruh terhadap masyarakat ini selanjutnya akan mempengaruhi tuntutan-tuntutan berikutnya yang diajukan terhadap sistem politik tersebut.

Model sistem politik seperti ini dapat kita lihat juga dalam kehidupan politik nagari. Namun tidak semua konsep yang ada dalam sistem politik tersebut ditemukan misalnya saja bagian dari sistem yang disebut dengan partai politik tidak ada dinagari, karena itu perlu dilakukan modifikasi terhadap sistem politik ini dinagari. Modifikasi sistem politik struktural fungsional Almond tersebut di nagari dapat digambarkan sebagai berikut :

---

[14] Mochtar Mas'oed dan Collin MacAndrews, *Perbandingan Sistem Politik*, Gajah Mada University Press, Yogyakarta, 1991, hal. 49

Gambar 1
Sistem politik struktural-fungsional dalam nagari

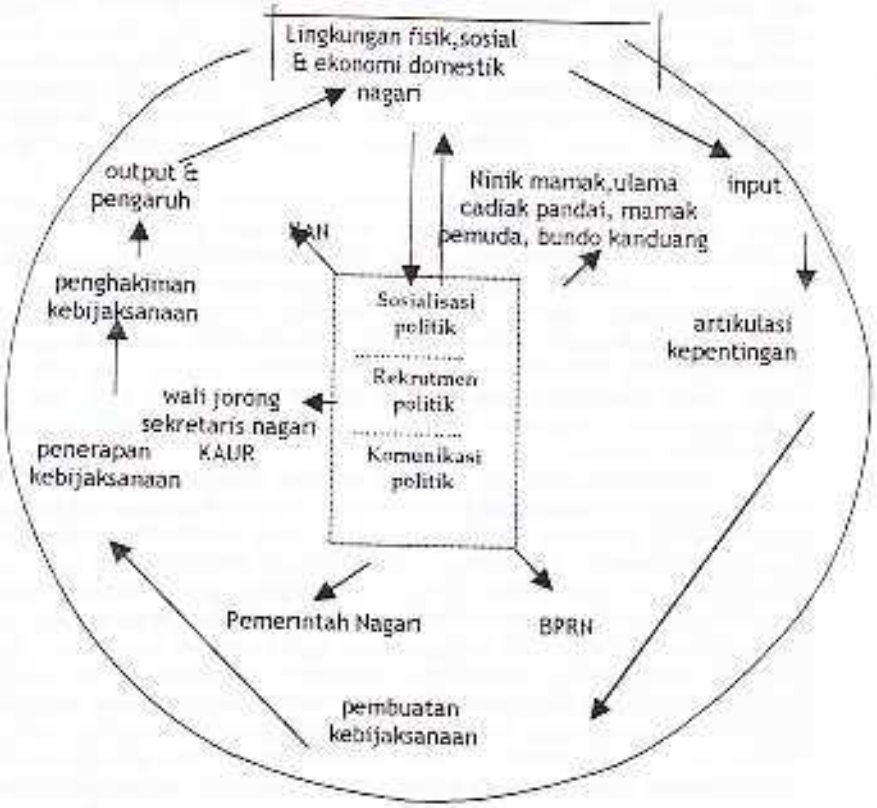

Sesuai dengan sistem politik Almond terdapat beberapa struktur atau lembaga-lembaga yang menjalankan fungsi-fungsi dalam sistem tersebut. Struktur yang ada dinagari adalah kelompok kepentingan seperti para ulama, para penghulu (ninik mamak), cadiak pandai, mamas,pemuda dan bundo kanduang. Sedangkan lembaga yang disebut dengan partai politik tidak terdapat dalam sistem politik nagari. Badan Perwakilan Rakyat nagari (BPRN) merupakan lembaga yang berperan sebagai legislatif nagari. Lembaga eksekutif adalah Pemerintah Nagari yang meliputi Wali nagari beserta perangkat nagari. Sedangkan yang dimaksud dengan lembaga birokrasi di nagari adalah para aparatur nagari. Aparatur nagari ini meliputi Sekretaris Nagari, Kepala Urusan (kaur) dan para Kepala Jorong. Lembaga atau badan peradilan di nagari hanya berupa lembaga peradilan normatif yaitu Kerapatan Adat nagari (KAN). Masing-masing lembaga ini menjalankan fungsi tertentu sehingga sistem politik di nagari dapat bekerja.

Metode Penelitian

Tulisan ini merupakan hasil penelitian survai yang dilakukan pada masyarakat nagari Kamang Mudik Kabupaten Agam. Sampel ditarik dengan dara *stratified random sampling* diseluruh masyarakat nagari tersebut yang sudah dewasa. Dengan menggunakan kuesioner sebagai alat penelitian, maka penelitian ini menghasil laporan yang berbentuk deskriptif kuantitatif.

Pengetahuan Masyarakat Tentang Pemerintahan dan Politik Nagari

Budaya politik sebagai fenomena umum dalam kehidupan politik masyarakat akan dipengaruhi oleh kompleks nilai yang dipahami dan dianut oleh masyarakat itu sendiri. Kehidupan politik masyarakat akan dipenuhi oleh interaksi antara orientasi yang dimilikinya. Untuk menggambarkan budaya politik masyarakat nagari pada penelitian ini digunakan tiga tolak ukur. *Pertama*, pengetahuan masyarakat tentang pemerintahan dan politik nagari. *Kedua*, perasaan (emosi) individu dalam pemerintahan dan politik nagari. *Ketiga* partisipasi politik individu dalam pemerintahan dan politik nagari.

Berdasarkan ketiga tolak ukur tersebut akan tergambar kecendrungan orientasi masyarakat terhadap pemerintahan dan proses politik yang terjadi. Kecendrungan orientasi politik masyarakat inilah yang membentuk gambaran budaya politik masyarakat Kamang Mudik.

Berbicara mengenai budaya politik, berarti harus menjelaskan orientasi kognitif individu terhadap sistem politiknya. Orientasi kognitif ini meliputi pengetahuan individu tentang sistem politik baik mengenai aspek politik maupun aspek pemerintahannya.[15] Pengetahuan individu ini akan mempengaruhi dan menentukan sikap dan partisipasi individu dalam proses politik secara umum.

Gambaran yang ditampilkan melalui data memperlihatkan bahwa masyarakat Kamang Mudik memiliki pengetahuan yang cukup tinggi tentang sistem politiknya secara umum. Sebagian besar dari masyarakat dapat mengetahuai struktur (lembaga-lembaga) yang ada dalam pemerintahan nagari. Mereka umumnya juga mengetahui fungsi dari lembaga-lembaga pemerintahan nagari tersebut. Meskipun ada sebagian kecil dari yang tidak tahu sama sekali dengan lembaga-lembaga nagari maupun fungsinya. Tetapi dari segi input hanya sebagian dari masyarakat yang benar-benar mengetahui sumber input dalam proses pembuatan keputusan di nagari. Umumnya mereka menyebutkan bahwa sumber input (masukan) adalah para tokoh masyarakat. Sebagian besar dari masyarakat malah tidak menganggap bahwa mereka sebagai bagian dari sistem politik merupakan sumber input (masukan) dalam pembutan keputusan. Hal ini terlihat dari hanya sebagian kecil dari mereka yang menyebutkan masyarakat sebagai sumber input. Padahal pengetahuan input individu sebagai anggota sistem akan sangat diperlukan bagi berjalannya artikulasi kepentingan.

Pengetahuan yang cukup baik pada masyarakat terlihat dari segi output. Sebagian besar masyarakat mengetahui tentang wewenang nagari untuk membuat peraturan dan umumnya mereka juga sudah mengetahui adanya peraturan nagari yang sudah diberlakukan. Demikian juga dengan pengetahuan masyarakat tentang para pemimpin nagari. Sebagian besar dari masyarakat mengenal pemimpin-pemimpin nagari

[15] Almond dan Verba, *op. Cit*, hal 55

meskipun ada sebagain yanga hanya kenal nama. Kemudian terlihat bahwa sebagian dari masyarakat memiliki informasi yang cukup baik tentang pemerintahan dan politik nagari.

Informasi yang diperoleh dan dimiliki seseorang tentang sistem politiknya akan sangat berpengaruh terhadap pandangan, sikap maupun partisipasinya dalam system tersebut[15]. Informasi yang dimiliki individu tersebut akan digunakan untuk menganalisa, menilai dan menentukan sikapnya terhadap sistem tersebut. Meskipun secara umum masyarakat memiliki pengetahuan yang cukup tinggi, tetapi mereka kurang menyadari pengaruh dan arti penting pemerintah. Hanya sebagian kecil dari mereka yang memiliki kesadaran tentang arti penting pemerintah.

Menurut Almond dan Verba jika warga negara sama sekali tidak menyadari pengaruh pemerintah atau hanya samar-samar saja dapat digolongkan sebagai kaum paroklal. [16] Namun dilain pihak masyarakat memiliki harapan yang tinggi untuk diperlakukan secara baik dan penuh perhatian oleh para aparat birokrasi (pemerintah nagari). Selain itu masyarakat memiliki penilaian yang positif atau tingkat kepercayaan yang tinggi terhadap birokrasi dan perasaan kompeten yang cukup kuat dalam berurusan dengannya.

Untuk melihat orientasi individu terhadap sisitem politiknya tidak hanya dilihat dari pengetahuan, pandangan dan penilaianya terhadap sistem tersebut, tetapi juga dilihat dari pandangannya terhadap keterlibatan dan peranannya dalam sistem politik tersebut. [17] Ciri lain yang menonjol dalam budaya politik masyarakat Kamang Mudik adalah tingginya minat dan perhatian mereka terhadap pemerintahan dan politik nagari. Hal ini terlihat dari banyaknya masyarakat yang menyatakan suka membicarakan masalah-masalah pemerintahan nagari dengan orang lain meskipun minat tersebut cendrung bersifat pasif. Mereka yang memiliki kesadaran tetapi cendrung pasif inilah yang menurut Almond dan Verba sebagai masyarakat yang memiliki budaya politik subyek.

Perhatian yang cukup tinggi juga terlihat dari tingginya frekuensi kerkutsertaan masyarakat dalam pemilihan Wali Nagari. Dimana sebagian besar dari mereka menyadari bahwa pemilihan pemimpin adalah tanggungjawab penting masyarakat. Tetapi minat dan kesadaran akan pemerintahan dan kegiatan politik masyarakat lebih cendrung bersifat pasif dan formal. Kesadaran untuk ikurtserta memberikan suara sangat tinggi tetapi tidak diikuti oleh kesadaran untuk menggunakan sarana informal keterlibatan politik seperti partisipasi aktif dalam memberikan masukan dalam rapat / pertemuan-pertemuan dan pembentukan kelompok-kelompok politik cendrung terbatas. Dengan demikian kesadaran dan minat mereka terhadap politik dan pemerintahan tidak mendukung berkembangnya partisipasi aktif dalam sistem politik.

Kebanyakan dari masyarakat memandang mereka tidak terlibat dan tidak memiliki peran aktif dalam sistem politik. Masyarakat lebih berorientasi pada kebijakan (output), hal ini terlihat dari jawaban mereka bahwa masyarakat berkewajiban untuk melaksanakan kebijakan yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Mereka secara sadar memperhatikan dan menilai prestasi pemerintah. Sedangkan pada sisi input mereka

[15] *ibid*, hal 71.
[16] *ibid*, hal.65.
[17] Sudajono, *op. Cit.*, hal. 47.

lebih cendrung tidak terlibat bahkan memandang sisi input merupakan peranan yang dipegang oleh para elit politik.

Orientasi masyarakat yang cendrung pada output ini menyebabkan mereka memiliki pandangan negatif terhadap peranan yang dapat mereka lakukan dalam sistem politik. Masyarakat umumnya menganggap dirinya tidak memiliki pengaruh dalam berhadapan dengan pemerintah. Hal ini terlihat dari kecendrungan rendahnya penilaian masyarakat terhadap kemampuan mereka untuk mempengaruhi pemerintah dalam pembuatan keputusan atau kebijaksanaan nagari. Masyarakat menganggap sebagai warga biasa mereka tidak memiliki kemampuan untuk merubah peraturan atau kebijaksanan yang dibuat oleh pemerintah meskipun peraturan tersebut merugikan mereka. Artinya mereka menerima begitu saja kebijaksanan atau keputusan yang dibuat para pemimpin dan mereka berkewajiban untuk melaksanakannya.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa masyarakat masih memiliki orientasi relatif pasif dalam sistem politik. Orientasi yang pasif ini menurut Almond dan Verba dapat dikategorikan sebagai orientasi subyek [19] meskipun terdapat perasaan kompetensi kognitif (pengetahuan) yang cukup tinggi pada sistem politik tersebut.

Budaya politik masyarakat nagari Kamang Mudik juga memperlihatkan partisipasi yang rendah dalam kegiatan-kegiatan politik. Meskipun sebagian besar dari masyarakat menyatakan ikut menjadi anggota dari organisasi-organisasi kemasyarakatan yang ada, tetapi mereka jarang yang aktif didalamnya. Dengan demikian kasempatan-kesempatan untuk memperoleh pengalaman politik sangat kecil sehingga norma-norma yang mendukung partisipasi politik aktif tidak berkembang dengan baik. [20]

Partisipasi aktif yang rendah dalam organisasi kemasyarakatan ini memepengaruhi partisipasi aktif masyarakat dalam politik. Hal ini terlihat dari rendahnya partisipasi masyarakat untuk ikut serta dalam rapat-rapat atau pertemuan nagari serta rendahnya partisipasi mereka untuk turut serta menyebarkan informasi-informasi tentang pemerintahan dan politik nagari.

Penutup

Secara umum masyarakat Kamang Mudik memiliki pengetahuan (orientasi kognitif) yang cukup tinggi tentang pemerintahan dan politik nagari. Mereka juga menyadari adanya kekuasaan dari pemerintahan nagari. Mereka juga memiliki perasaan (emosi) yang tinggi meskipun lebih cenderung bersifat pasif. Tetapi pengetahuan dan kesadaran tersebut tidak mendukung partisipasi mereka dalam sistem politik. Masyarakat umumnya cendrung menjadi warga yang pasif dan memiliki pandangan negatif terhadap kemampuan pengaruh mereka ketika berhadapan dengan pemerintah. Mereka memperlihatkan partisipasi yang rendah dalam kegiatan-kegiatan pemerintahan dan politik nagari.

Ciri-ciri ini memperlihatkan bahwa masyarakat cendrung menjadi subyek yang pasif. Berdasarkan kategori yang diberikan Almond dan Verba, masyarakat Kamang Mudik dapat digolongkan sebagai masyarakat yang cenderung memiliki budaya politik subyek.

---

[19] Almond dan Verba, op. Cit., hal. 210.
[20] Ibid, hal. 378.

Daftar Pustaka

Alfian dan Nazarudi Syamsuddin, *Profil Budaya Politik Indonesia*,Pustaka Utama Grafiti, Jakarta, 1991.

Alfian (ed), *Persepsi Masyarakat Tentang Kebudayaan*, PT Gramedia, Jakarta, 1985.

Almond, Gabriel dan Verba, *Budaya Politik, Tingkahlaku Politik dan Demokrasi di Lima Negara*, Terj. Sahat Simamora, Bina Aksara, Jakarta, 1984.

Gafar, Affan, *Politik Indonesia transisi Menuju Demokrasi*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2000.

Kantaprawira, Rusadi, *Sistem Politik Indonesia Suatu Model*, Sinar Baru, Bandung, 1988.

Mas'oed, Mochtar dan Collins Mac Andrews, *Perbandingan Sistem Politik*, Gajah Mada University Press, Yogyakarta, 1991.

Sastroadmodjo, Sudijono, *Perilaku Politik*, IKIP Semarang Pres, Semarang, 1995.

Zed, Mestika, "Nagari Minangkabau dan Pengaruh Sistem Kolonial", *Jurnal Kebudayaan No. 3*, Yayasan Genta Budaya, Padang, 1996.

Peraturan Daerah Propinsi Sumatera Barat No. 9 Tahun 2000 tentang Pemerintahan Nagari, Bagian Hukum Sekretariat Daerah Propinsi Sumatera Barat.

Peraturan Daerah Kabupaten Agam No. 31 Tahuen 2001 tentang Pemerintahan Nagari, Bagian Hukum Sekretariat Daerah kabupaten Agam, Lubuk Basung, 2001.